

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI KABUPATEN BENER MERIAH

Achmad Surya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih

Email : surya_gayo85@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana, namun kenyataannya kegiatan pertambangan pasir tanpa izin masih marak terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah dan untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah. Jenis penelitian ini yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah kurang maksimal dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertambangan, Tanpa izin.

ABSTRACT

Unauthorized mining has in fact fulfilled the requirements that could be threatened by law, but in fact mining activities without permits are still being carried out in Bener Meriah Regency. The purpose of this study was to determine the law enforcement against C mining without permission in Bener Meriah Regency and to determine the approval of law enforcement on mining C without mining permission in Bener Meriah Regency. This type of research is empirical juridical descriptive analysis. Source of data used in this study are primary data and secondary data. The results of law enforcement research on unlicensed mining in Bener Meriah Regency are less than optimal and do not have a permit granted to mining activities without a permit. Constraints in law enforcement against law enforcement without permission, public awareness and rejection between the police and the Environmental Service of Bener Meriah Regency.

Keywords : Law Enforcement, Mining, Without permission.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut memiliki makna bahwa Negara memiliki kedaulatan mutlak atas kekayaan sumber daya alam dan hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. “Hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam”.¹ Ketentuan ini mengandung pesan bahwa Pemerintah memiliki hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan dan merata. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh Negara dan pemerintah Indonesia. Salah satu instrumen untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pengelolaan sumber daya alam.²

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.³ Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui khususnya yang terdapat dalam perut bumi saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan. Hal tersebut karena dengan adanya kegiatan itu akan memacu penyerapan tenaga kerja dan menyumbang Pendapatan Asli

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Penambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

² Otong Rosadi, 2012, *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 7.

³ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.



Daerah (PAD) terhadap daerah yang dijadikan lokasi kegiatan eksploitasi. Salah satu kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya adalah kegiatan dalam bidang pertambangan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. *Kedua*, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. *Ketiga*, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis pasir, batu, limestone, dan lain-lain.⁴

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi. Selanjutnya, IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah Provinsi. Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan

⁴ Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 12.

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan, mengatur Persyaratan izin untuk penambang pasir, untuk orang perseorangan meliputi :

1. Surat permohonan;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4. Surat keterangan domisili.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara Dan Mineral, menyebutkan bahwa : “Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Namun kenyataannya di Kabupaten Bener Meriah Pertambangan Bahan Galian Golongan C khususnya pasir masih marak terjadi, ironisnya penambangan pasir tanpa izin dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, dimana kegiatan pertambangan tersebut telah beroperasi selama tahun 2014 yang lalu. Akibat pertambangan pasir tanpa izin tersebut berdampak terhadap rusaknya akses jalan disekitar perumahan masyarakat sekitar lokasi penambangan karena dilalui truk-truk pengangkut pasir setiap hari, sehingga menyebabkan erosi tanah dan perubahan permukaan lahan (tanah).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah. *Kedua*, Apakah kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini *yuridis empiris* yang bersifat *deskriptif analisis*. Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer yang bersumber dari data lapangan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung tentang permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, dengan cara menganalisis, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan data sekunder atau data pustaka.⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu adanya

⁵ Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, "Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48. No.2, April 2019, hlm. 226.



izin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 yang “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dapat ditafsirkan bahwa barangsiapa melakukan usaha pertambangan pasir tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi para pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa izin maupun bagi para penegak hukum yang seharusnya bekerja untuk menciptakan keselarasan hukum namun dalam hal ini malah menutupi kegiatan yang ada dapat di jatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut.

Jumlah penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah yang dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah kepada pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Penambang Galian Tanpa Izin Yang Dilaporkan Ke
Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2019

<i>No</i>	<i>Nama Penambang</i>	<i>Alamat</i>	<i>Keterangan</i>
1	Supriyono	Lampahan Kec. Timang Gajah	Tidak Diproses
2	Ridwansyah	Suka Rame Kec. Wih Pesam	Tidak Diproses

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Kabupaten Bener Meriah berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2016 tercatat ada 2 kasus yang dilaporkan dan tidak ada diselesaikan sama sekali oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah. Penyebab terjadinya pertambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah adalah *Pertama*, akibat faktor ekonomi, yang menyebabkan sulitnya mendapatkan kerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah. Maraknya penambangan pasir tanpa izin di kabupaten Bener Meriah. *Kedua*, karena Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama ditengarai merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

Hal tersebut senada yang diutarakan oleh Supriyono, bahwa faktor terjadinya pertambangan pasir tanpa izin karena sulit memperoleh izin dari dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah dan prosesnya perizinannya juga sangat lama.⁶ Hal yang berbeda yang diutarakan oleh Ridwansyah, saya melakukan pertambangan pasir tanpa izin, saya menghindari dari kewajiban membayar sejumlah pajak, jika saya memperoleh izin sudah tentu saya wajib untuk membayar pajak dari kegiatan pertambnagan yang saya lakukan. Jadi saya nekat mengambil jalan pintas dengan melakukan pertambanagan dan pengangkutan pasir tanpa izin untuk menghindari pajak tersebut.⁷

Kegiatan pertambangan mineral harus memiliki izin usaha pertambangan baik izin usaha pertambangan yang diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara dimana bupati, gubernur atau menteri yang berhak memberikan izin tersebut yaitu izin usaha pertambangan hanya dapat diberikan oleh Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara.

⁶ Supriyono, Penambang Pasir Tanpa Izin Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 8 Maret 2019.

⁷ Ridwansyah, Penambang Pasir Tanpa Izin Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 14 Maret 2019.



Menurut Muhammad Rizal, perbuatan pidana di bidang pertambangan dapat ditentukan jenisnya. *Pertama*, melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin sama sekali. *Kedua*, melakukan kegiatan pertambangan dengan izin yang sudah mati atau berakhir. *Ketiga*, melakukan kegiatan pertambangan di luar areal atau di luar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam izin yang telah diberikan. *Keempat*, melakukan kegiatan pertambangan dengan memanfaatkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya.⁸

Berbicara mengenai aspek tindak pidana terhadap masyarakat penambang pasir tanpa izin, tentu saja berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana dari para pelaku pertambangan pasir tanpa izin dan tidak boleh lepas dari aspek kesalahan yang bertujuan untuk membenarkan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan. Hukum pidana mengkehendaki bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para masyarakat pelaku penambang pasir tanpa izin sebanding dengan tingkat kesalahannya. Seberapa besar pengaruh negatif pertambangan pasir tanpa izin terhadap lingkungan hidup, ada atau tidaknya teguran atau himbauan dari aparat penegak hukum dan pemerintah yang sifatnya menganjurkan masyarakat tidak melakukan pertambangan pasir tanpa izin meskipun alasan berlangsungnya kegiatan ini karena merupakan sebuah mata pencaharian, merupakan alasan-alasan pertimbangan pada waktu menjatuhkan hukuman.

Pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pertambangan pasir tanpa izin, ketika adanya laporan dari masyarakat yang di duga tindak pidana dan ditemukan langsung oleh petugas maka pihak kepolisian Bener Meriah melakukan penegakan hukum di bidang pertambangan yang dalam hal ini di proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

⁸ Muhammad Rizal, Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2019.

⁹ Herdian, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 3 April 2019.



Penegakan hukum terhadap pertambangan pasir tanpa izin yang terjadi Kabupaten Bener Meriah sangatlah di butuhkan oleh dinas terkait yang menangani masalah pertambangan dalam hal ini Dinas Pertambangan. Akan tetapi pada dasarnya penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal. Dikarenakan Pertambangan pasir merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat yang dikerjakan secara turun temurun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, meskipun peraturan untuk mencegah pertambangan pasir tanpa izin telah dibuat. Penegakan hukum terhadap para penambang pasir tanpa izin tidak di lakukan karena hanya itulah mata pencaharian masyarakat setempat. Jika ditindak pemberhentian pertambangan pasir tanpa izin justru akan menambah angka pengangguran serta kemiskinan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan lain.¹⁰

Dengan kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah dapat kita pahami bahwa hukum belum bekerja secara baik terhadap masyarakat tersebut dan aparat penegak hukum memiliki kelemahan dalam pengawasan dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan pasir tanpa izin tersebut. Pelaksanaan penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah dapat dicegah dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah ataupun dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kenyataannya, penegakan hukum belum dilaksanakan sesuai harapan karena kurangnya komitmen dan keberanian aparat penegak hukum dalam melakukan terobosan hukum di bidang pertambangan.

Polisi selaku Penyidik dalam penanganan perkara pertambangan belum memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara pertambangan. Artinya bahwa hukum itu ada ditengah masyarakat namun belum secara maksimal ditegakkan karena rasa toleransi masih diberikan oleh pemerintah dan Kepolisian kepada masyarakat pelaku

¹⁰ Jamaluddin, Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2019.



pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini yang semakin menjatuhkan harkat serta martabat hukum ditengah masyarakat, sehingga masyarakat menjadi pihak yang sangat dirugikan akibat dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan pasir ini. Memang pada dasarnya kegiatan pertambangan pasir tanpa izin menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan, namun kerusakan lingkungan dan kerugian yang sangat besar pada kas daerah menjadi alasan mengapa hukum harus hadir untuk bekerja serta membenahi.

Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah

Dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum, kiranya banyak masalah yang dihadapi mengingat adanya keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhi nya. Pengaruh ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya bahkan terkadang pengaruh ini merupakan bagian dari berbagai bagian dari kendala dalam upaya penegakan hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah, yaitu :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian masyarakat yang menjadi pekerja penambangan pasir sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak untuk kehidupan keluarga sehari-hari, meskipun kegiatan yang mereka lakukan tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan dengan peraturan undang-undang, yang berdampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun masyarakat di areal tambang.

Jamaludin menjelaskan bahwa, tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Bener Meriah sebagian masyarakat yang menjadi penambang tidak lagi menghiraukan setiap



aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjadi pelaku penambangan pasir tanpa izin sudah menjadikan kegiatan ini sebagai budaya, bukan lagi sebagai pekerjaan alternatif.¹¹

2. Kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas terkait.

Kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin sangat diperlukan ada atau tidaknya bukti surat izin usaha pertambangan yang sah dari dinas terkait. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan koordinasi secara baik agar proses penegakan hukum dapat terlaksana, jika tidak adanya koordinasi yang baik hal tersebut dapat menghambat proses penyidikan atau pelaksanaan penegakan hukum.

Menurut Bery Barus, pada saat Kepolisian Kabupaten Bener Meriah melakukan operasi atau razia ke lokasi pertambangan pasir banyak ditemukan penambang yang sedang beraktivitas pertambangan tidak dapat menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang sah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah. Para penambang berasalan bahwa mereka sudah mengajukan permohonan izin ke dinas terkait, namun dinas terkait belum menerbitkan izin usaha pertambangan secara resmi.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan tetap

¹¹ Jamaluddin, Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2019.

¹² Bery Barus, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2019.



mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan tindak pidana pertambangan.

Upaya untuk menanggulangi praktek penambang pasir tanpa izin dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*). Upaya *preventif* merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana penambang pasir tanpa izin, sedangkan upaya represif suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana penambang pasir tanpa izin terjadi. Usaha yang bersifat represif ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Untuk menanggulangi praktek penambang pasir tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, upaya pendekatan yang dilakukan yakni :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Semua Pihak Terkait

Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dan memberantas tindak pidana pertambangan pasir ilegal selalu berupaya meningkatkan kinerja agar bisa tercipta penegakan hukum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga upaya mencegah dan mengurangi terjadinya perbuatan pertambangan tanpa izin khusus jika pelakunya terindikasi oknum aparat penegak hukum meminta kepada seluruh pihak dan masyarakat agar melaporkan tindakan menyimpang yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut ke kepolisian resort kabupaten bener meriah.¹³

2. Melakukan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sosialisasi merupakan proses pengembangan potensi kemanusiaan melalui penyerapan nilai-nilai, norma-norma, dan beragam

¹³ Bery Barus, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2019.



aspek kebudayaan masyarakat seutuhnya. Sosialisasi memungkinkan orang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat, sehingga terhindar dari perilaku asosial atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah adalah minimnya sosialisasi dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan dan beserta sanksi pidana nya.

Sosialisasi dilakukan secara teratur dan terus menerus kepada masyarakat. Dimana dalam sosialisasi ini diinformasikan kepada masyarakat tentang bahaya yang akan mengancam bila praktek penambangan pasir tanpa izin terus berjalan selain itu dalam sosialisasi juga diberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi pidana yang akan diterima bila melakukan praktek pertambangan pasir tanpa izin.¹⁴ Dengan dilakukannya sosialisasi ini maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung proses penegakan hukum pertambangan pasir tanpa izin serta masyarakat menyadari penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama.

3. Melakukan Patroli dan razia kegiatan pertambangan tanpa izin secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bener Meriah.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek penambang pasir tanpa izin adalah memperketat patroli di sekitar kawasan pertambangan. Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang

¹⁴ Jamaluddin, Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Pengawasan Lingkungan Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2019.

berkaitan dengan pengangkutan dan pertambangan pasir. Untuk meningkatkan pengawasan akan dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan, dan Kejaksaan untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah.¹⁵

Patroli yang dilakukan secara rutin merupakan upaya pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin. Dengan melakukan patroli tentunya diharapkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian bisa langsung memantau dan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen izin terhadap pelaku pertambangan, dengan upaya patroli ini dapat mengurangi praktek pertambangan tanpa izin yang terjadi saat ini di Kabupaten Bener Meriah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Dinas terkait mengenai pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah, yaitu melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin, melakukan operasi rutin pada setiap kegiatan pertambangan di Kabupaten Bener Meriah, meningkatkan pengetahuan penyidik yang berkompeten dalam bidang tindak pidana lingkungan hidup dan meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah kurang maksimal, dapat dipahami bahwa hukum belum bekerja secara baik dalam masyarakat dan aparat penegak hukum masih memiliki kelemahan dalam pengawasan dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kendala

¹⁵ Herdian, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 3 April 2019.



dalam penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah, (1). kurangnya kesadaran hukum masyarakat; (2). pelaku penambangan pasir tanpa izin di *back-up* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab; dan (4). kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah. Upaya yang dilakukan, yaitu (1). meningkatkan kinerja satuan kepolisian dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait; (2). melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; (3). melakukan patroli dan razia kegiatan pertambangan tanpa izin secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Penambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Otong Rosadi, 2012, *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*, Thafa Media, Yogyakarta.

B. Artikel Ilmiah

- Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, “Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48. No.2, April 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.